

Motif calon legislatif dalam menentukan partai politik pilihannya: Calon legislatif partai politik non-parlemen

Bobby J Yuri, Tengku Rika Valentina*, Asrinaldi

¹Departement Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: bobbyj.yuri@gmail.com; tengkurika@soc.unand.ac.id;
asrinaldi@soc.unand.ac.id

Naskah diterima: 13/12/2023; Revisi: 22/12/2023; Disetujui: 31/12/2023

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai motif dari calon legislatif dalam pencalonannya di Pemilu Tahun 2024. Masih banyak ditemukan calon legislatif yang maju dari partai politik non-parlemen yang secara historis tidak dapat meraih suara yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan apa motif yang mendasari calon legislatif memilih partai politiknya. Ada tiga indikator dalam menentukan keputusan menurut Verba dan Schlozman yakni 1) sumber daya, 2) keterlibatan, dan 3) mobilisasi. Peneliti mewawancarai secara mendalam calon legislatif yang bertahan di partai politik lamanya. Hasil penelitian dianalisis dengan pendekatan triangulasi. Keterangan narasumber peneliti sandingkan dengan konsep/teori yang berasal dari berbagai sumber kepustakaan. Ditemukan bahwa para calon legislatif ini tidak memiliki pilihan lain untuk pindah partai. Kondisi ini dipengaruhi dengan kaderisasi partai politik yang buruk.

Kata kunci : *motif; calon legislatif; partai politik; kaderisasi.*

Motives of legislative candidates in determining their choice of political party: Legislative candidates from non-parliamentary political parties

Abstract

This research discusses the motives of legislative candidates in their candidacy in the 2024 elections. There are still many legislative candidates running from non-parliamentary political parties which historically have not been able to gain significant votes. This research uses qualitative research methods to describe the motives underlying legislative candidates in choosing their political parties. There are three indicators in determining decisions according to Verba and Schlozman, namely 1) resources, 2) involvement, and 3) mobilization. Researchers interviewed legislative candidates in depth who remained in their old political parties. The research results were analyzed using a triangulation approach. Compare the information from research sources with concepts/theories originating from various literature sources. It was found that these legislative candidates had no other choice to change parties. This condition is influenced by poor political party cadre formation.

Keywords: *motive; legislative candidates; political party; cadre formation.*

Pendahuluan

Pemilu Tahun 2024 di Indonesia masih menimbulkan kontroversi yang sama dengan Pemilu Tahun 2019. Seperti partai politik parlemen dapat menggunakan nomor urut sama seperti nomor urutnya pada Pemilu Tahun 2019 (Farisa, 2022; Waku, 2022). Salah satu kontroversi yang menjadi sorotan adalah perbedaan perlakuan antara partai politik parlemen dan partai politik non-parlemen dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, anggapan bahwa diskriminasi bagi partai-partai baru terus digulirkan oleh para pemerhati kepemiluan (Sultan dkk., 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang ada di Parlemen tidak diharuskan mengikuti tahapan verifikasi faktual seperti partai-partai politik baru dan non-parlemen, hal ini akan tidak akan menghilangkan risiko kegandaan keanggotaan partai politik, baik secara internal maupun eksternal dengan partai politik lainnya. Dengan asas one man one vote, kegandaan keanggotaan partai politik akan menghancurkan asas keadilan dalam demokrasi.

Namun, dapat diakui kerumitan dalam administrasi keanggotaan partai politik ini konsekuensi dari partai politik di Indonesia masih belum dapat menjalankan sistem kepartaian yang kuat, khususnya dalam hal kaderisasi (Artada, 2023; N. Rayda, 2023). Dapat dilihat masih terlihat banyaknya fenomena kader yang dengan mudah berpindah partai, hal ini dapat disebabkan oleh sistem pencalonan legislatif di Indonesia yang menggunakan sistem proporsional terbuka (Saragih, 2023). Bahkan hal ini terjadi direntang waktu yang tidak jauh dari jadwal pemilu, sehingga partai politik sendiri kesulitan menyiapkan persyaratan administrasi untuk keperluan tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024.

Sistem proporsional terbuka berimbas pada pemilih dalam menentukan perwakilannya di parlemen dipengaruhi oleh tingkat ketokohan masing-masing calon legislatif (Hangartner dkk., 2019). Dapat dilihat bahwa tingkat popularitas calon legislatif saling berpengaruh dengan tingkat elektabilitas partai politik. Dalam praktiknya dengan sistem proporsional terbuka, sebelum dapat menarik dukungan dari pemilih dalam pemilu, terlebih dahulu partai politik harus dapat menarik dukungan dari tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi calon legislatif.

Sebagaimana dalam sebuah seleksi, calon legislatif harus memiliki strategi agar dapat meraih dukungan rakyat dalam pemilu. Melihat fenomena banyaknya praktik "kutu loncat" calon legislatif menunjukkan bahwa calon legislatif sendiri memiliki preferensi untuk memilih "perahu" sebagai jalan yang akan mengantarkannya ke kursi parlemen (N. Rayda, 2023). Meskipun dibanyak negara praktik berpindah partai politik ini dilarang, namun di Indonesia sepertinya menjadi salah satu strategi calon legislatif. Memilih partai politik yang tepat untuk dapat bersinergi untuk meraih suara individu maupun suara partai politik, sesuai dengan kesamaan nilai-nilai politik yang akan diperjuangkan. Banyak kajian mengenai perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya di pemilu, namun sedikit pembahasan mengenai preferensi calon legislatif dalam memilih partai politik, hal inilah yang menjadi fokus dalam tulisan ini.

Seperti yang telah dijabarkan dalam paragraf terdahulu, partai politik parlemen memiliki banyak privilege dibanding dengan partai politik non-parlemen. Keuntungan yang paling kentara yakni calon legislatif partai politik parlemen cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar akan terdongkrak elektabilitasnya dengan elektabilitas partai politik itu sendiri. Namun setidaknya, terdapat 8 partai politik baru yang lolos

verifikasi sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Indonesia. Partai politik baru non-parlemen ini berhasil mengumpulkan dukungan dan anggota partai, serta dapat mengajukan calon legislatif untuk parlemen, baik tingkat nasional maupun lokal.

Tabel 1 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

No.	Partai Politik	Pemilu Tahun 2019			Jumlah Calon Legislatif DPR RI	Jumlah Calon Legislatif Pemilu Tahun 2024
		Peserta	Menang (Parlemen)	Jumlah Calon Legislatif DPR RI		
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Ya	Ya	575	580	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Ya	Ya	575	580	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Ya	Ya	575	580	
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	Ya	Ya	575	580	
5	Partai NasDem	Ya	Ya	575	580	
6	Partai Buruh	Tidak	Tidak	-	580	
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Ya	Ya	538	580	
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	Ya	Ya	575	580	
9	Partai Demokrat	Ya	Ya	575	580	
10	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		Tidak	575	580	
11	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Ya	Ya	557	580	
12	Partai Perindo	Ya	Tidak	575	579	
13	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	Ya	Tidak	375	570	
14	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Tidak	Tidak	-	525	
15	Partai Ummat	Tidak	Tidak	-	512	
16	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Ya	Tidak	559	485	
17	Partai Bulan Bintang (PBB)	Ya	Tidak	415	470	
18	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	Tidak	Tidak	-	396	
Jumlah					9917	

Sumber: Data olahan Peneliti (2024)..

Dari Tabel 1 terlihat masih banyak calon legislatif yang berani maju melalui partai politik non parlemen. Partai politik non-parlemen ini dibagi menjadi dua kondisi, yakni partai politik non-parlemen yang pernah mengikuti Pemilu Tahun 2019 dan partai politik baru mengikuti pemilu pada tahun 2024. Tentu hal ada perbedaan tentang motif dari calon legislatif apakah akan tetap menggunakan partai politik yang sama dengan sebelumnya atau memilih untuk berpindah ke partai politik lainnya

Keunikan lainnya yang dapat dilihat dari Tabel 1 adalah hanya Partai Hanura yang mengalami penurunan jumlah calon legislatif untuk Pemilihan Anggota DPR RI. Bahkan di Provinsi Riau, Partai Hanura gagal mempertahankan satu-satunya kader yang menduduki jabatan Anggota DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024 untuk kembali maju sebagai calon legislatif Partai Hanura di Pemilu Tahun 2024 (Gustien, 2023; Putra, 2023; Vidiani, 2023). Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa begitu dinamisnya motif para calon legislatif dalam memilih partai politik. Dalam kajian ini,

peneliti memfokuskan untuk dapat menggali apa motif yang mendasari perilaku politik calon legislatif untuk bertahan pada partai politik lamanya dan tidak melakukan tindakan pindah partai.

Kajian mengenai perilaku politik sudah dilakukan sejak awal perkembangan ilmu politik sendiri. Menurut [Surbakti \(1992\)](#), perilaku politik merupakan setiap tindakan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan politik seorang aktor politik. Proses ini sering kali dipengaruhi dengan perilaku-perilaku lainnya seperti perilaku budaya, perilaku keagamaan, perilaku organisasi, maupun perilaku ekonomi. Perilaku politik sering dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Begitu pula calon legislatif sebagai aktor politik akan memperhatikan faktor-faktor tersebut sebelum menentukan partai politik pilihannya.

Menurut [Budiardjo \(2003\)](#) perilaku politik dapat menggambarkan sebuah ikatan rasa kepercayaan terhadap sesuatu untuk dapat menjawab fenomena-fenomena ataupun kondisi objek politik tertentu. Sebagai aktor yang dengan tingkat partisipasi tinggi, calon legislatif akan memilih partai politik dengan melihat kesamaan nilai-nilai politik dengan dirinya. Namun, tidak dipungkiri dengan era demokrasi dan globalisasi saat ini, nilai-nilai politis yang sakral tergerus dengan praktik-praktik pragmatis ([Aminuddin dkk., 2015](#); [Negara & Sardini, 2020](#); [Pradana, 2020](#)). Verba dan Schlozman menyebutkan setidaknya ada tiga indikator yang mempengaruhi partisipasi aktor politik, yakni 1) sumber daya, 2) keterlibatan, dan 3) mobilisasi. Dalam penelitian ini, ketiga indikator digunakan peneliti untuk menggali perilaku politik calon legislatif ([Bob-Milliar, 2012](#)). Penelitian mengenai perilaku politik seringkali hanya berfokus pada konsep voting behavior, yakni bagaimana cara individu menentukan pilihannya untuk memilih kandidat untuk mewakili di dalam sistem politik. Namun, penelitian ini berfokus untuk mencari motif dari aktor politik, dalam hal ini calon legislatif yang bertanding dalam pemilu untuk menentukan partai politik sebagai kendaraan politiknya. Karena hal ini akan berguna dalam proses assessment pilihan politik yang dimulai dari tahap awal perilaku politik individu. Bagaimanapun, perilaku politik yang didasari oleh pragmatisme akan selalu mencederai cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil.

Metode

Penelitian menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif untuk dapat menggambarkan motif calon legislatif dalam proses pemilihan partai politik. Analisis dilakukan terhadap data-data yang didapatkan melalui wawancara mendalam dari narasumber penelitian.. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023, setelah ditetapkan DCT oleh KPU. Peneliti dapat menentukan narasumber yang memenuhi kriteria, yakni calon legislatif yang pernah maju dengan partai politik yang sama dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 meskipun partai politik tersebut tidak memiliki perwakilan di parlemen. Data yang peneliti dapatkan dianalisis menggunakan teknik triangulasi. Hasil wawancara akan disandingkan dengan data-data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber kepustakaan seperti jurnal penelitian, buku-buku, berita baik konvensional maupun online, dan media massa lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Berangkat dari keunikan yang dirasakan oleh peneliti melihat fenomena masih banyaknya calon legislatif yang berani maju menggunakan partai politik yang secara historis tidak berhasil mendapatkan kursi di parlemen mengetuk rasa ingin tahu apa yang menjadi motivasi atas perilaku politik tersebut. Meskipun berbagai literatur menyampaikan bahwa partai memiliki pengaruh yang cukup besar dalam keberhasilan calon legislatif untuk menduduki kursi parlemen. Partai politik berusaha dengan segala cara agar dapat memenuhi persyaratan pendaftaran calon peserta Pemilu Tahun 2024, salah satunya dengan menarik sebanyak-banyaknya tokoh-tokoh yang berpotensi untuk dinominasikan sebagai calon legislatif.

Namun, tudingan-tudingan miring terhadap partai politik muncul karena menganggap partai politik tidak serius dalam melakukan penjarangan bakal calon legislatif, fenomena banyaknya tokoh-tokoh dengan popularitas tinggi (publik figur, aktor, aktris, penyanyi, pelawak) yang dianggap tidak memiliki banyak pengalaman dibidang kenegaraan dinilai sebagai pemenuhan nafsu partai politik untuk menguasai dominasi kursi parlemen saja (Iman, 2023; Subekti & Al-Hamdi, 2023; Wiryono & Setuningsih, 2023). Terutama untuk menjadi kader yang di nominasikan menjadi calon legislatif memerlukan sumber daya yang besar, baik mental maupun materi dimana hal ini sulit dicapai pada partai politik yang tidak memiliki sistem pengkaderan yang kokoh (Aji & Indrawan, 2020; Budiastrawan, 2023).

Temuan peneliti merujuk dari keterangan narasumber AD, seorang calon legislatif yang mengikuti kontestasi pemilihan anggota DPR RI untuk kedua kalinya dari partai politik yang sama. AD menyatakan tidak perlu pindah partai politik karena tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bergabung di partai lain. AD mengungkapkan bahwa masih ada praktik "mahar politik" sehingga partai politik yang telah memiliki massa cenderung akan meminta imbalan yang lebih. Sistem proporsional terbuka di Indonesia menimbulkan biaya politik yang begitu mahal. Pimpinan partai politik sebagai "business owner" politik akan mencari sumber daya operasional partainya, sehingga orang-orang bersumber daya besar yang hanya bisa untuk mencalonkan diri (Arriola dkk., 2022; Hidayaturrahman dkk., 2022; Prabowo dkk., 2020).

Mendekati masa pendaftaran calon legislatif, partai politik akan bergerak mendekati tokoh-tokoh yang berpotensi. Namun, tidak semua partai politik menargetkan calon legislatif yang memiliki popularitas. Dari pengakuan LS, beliau bersedia maju dari partai politik yang secara historis tidak pernah menghantarkan kadernya ke kursi parlemen karena untuk memenuhi persyaratan batas minimal calon legislatif berjenis kelamin perempuan. Semangat emansipasi wanita memang sebagai isu yang selalu menjadi sorotan sehingga negara mewajibkan partai politik untuk mengajukan calon legislatif perempuan sebanyak 30% di setiap daerah pemilihan agar dapat mengikuti pemilu. Hal ini memberikan tekanan kepada partai politik, karena budaya patriarki masih cukup kuat di Indonesia sehingga pemimpin perempuan kurang populer (Jati, 2014; Kiftiyah, 2019; Priandi & Roisah, 2019).

Dari uraian hasil penelitian di atas, ditemukan beberapa faktor yang mendasari calon legislatif menentukan partai politik sebagai kendaraan politiknya yakni pertama, ketidakmampuan calon legislatif untuk bersaing dalam pencalonan internal di partai politik yang memiliki prospek keterpilihan lebih tinggi. Sebagai suatu organisasi ideal partai politik merupakan manifestasi dari gabungan individu-individu yang memiliki cita-cita yang sama, sehingga pada akhirnya diperlukan seseorang yang akan menjadi

representasi keinginan partai politik. Namun, saat ini yang terjadi calon legislatif memilih partai politik bukan karena kesamaan ideologis, melainkan lebih ke aspek ekonomis. Sistem politik di Indonesia yang menjadikan ongkos politik yang mahal menjadikan calon legislatif untuk memilih partai politik yang tidak meminta uang mahar pencalonan (Priyanda, 2023). Biasanya partai politik baru dan yang tidak memiliki wakil di parlemen cenderung tidak memerhatikan sumber daya finansial dari calon legislatif. Calon legislatif memilih bertahan dalam partai politik yang tidak memerlukan banyak modal finansial meskipun partai politik itu tidak memiliki kesempatan meraih suara yang besar.

Kedua, ketidakmampuan partai politik melakukan kaderisasi yang baik. Strategi partai politik untuk mendapatkan dukungan pemilih secara cepat cenderung menggunakan coattail effect dari tokoh-tokoh diluar kader semakin memperburuk sistem kepartaian. Kader loyal pada akhirnya akan kalah dengan "kader istimewa" yang bergabung karena kepentingan oportunistis semata. Kader loyal yang telah bergabung dan bertahan partai politiknya namun tidak memiliki sumber daya menganggap akan sulit untuk memulai kembali apabila harus pindah ke partai politik yang telah memiliki basis elektabilitas tinggi. Ketiga, mobilisasi elit lokal partai politik. Tidak hanya pemilih ditingkat grassroot yang dapat dimobilisasi. Kader partai politik yang maju sebagai calon legislatif dapat disebut sebagai elit lokal partai politik meskipun pilihan untuk mendaftar sebagai calon legislatif itu berasal dari perintah elit partai politik yang lebih tinggi. Praktik mobilisasi elit lokal partai politik ini marak terjadi di Indonesia karena berhubungan dengan karakteristik partai politik di Indonesia yang sentralistik, berbanding terbalik dengan prinsip bottom-up demokrasi. Masyarakat belum secara sadar untuk berperan aktif dalam dinamika politik yang terjadi. Kaderisasi sebagai sarana pendidikan politik tidak digunakan secara baik oleh partai politik, malah kaderisasi menjadi alat mengumpulkan sumber daya pragmatis dalam pemilihan.

Simpulan

Dengan fenomena yang dipaparkan, masih tampak permasalahan dalam proses kaderisasi partai politik di Indonesia. Partai politik saat ini telah berkembang ke arah pragmatisme. Sehingga partai politik kesulitan untuk menanamkan ideologi kepada kader, karena dituntut untuk mencari kemenangan dalam pemilu dengan menggunakan segala cara. Ditemukan bahwa beberapa calon legislatif maju dalam pemilu tidak memiliki motif politik yang besar. Calon legislatif yang mengikuti pemilu dilatarbelakangi karena dimobilisasi oleh partai politik hanya sekedar pemenuhan syarat pendaftaran peserta pemilu.

Fungsi kaderisasi harus ditegaskan sebagai sarana pendidikan politik, bukan hanya kepada simpatisan namun juga sebagai kegiatan rutin partai politik terhadap bakti untuk masyarakat. Kampanye yang dilakukan partai politik dimasa jelang pemilu menegaskan sikap pragmatisme partai politik yang menjadi cikal bakal perilaku korupsi apabila mendapatkan kekuasaan. Pendidikan politik harus menjadi agenda nasional yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan umum hingga melibatkan para penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP di Indonesia. Masing-masing stakeholder pemilu dapat berkolaborasi, sehingga pemilu yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik. Partai politik yang menjadi aktor utama pendidikan politik harus berperan aktif menggandeng pihak-pihak bekepentingan dalam melakukan kaderisasi untuk memberikan pemahaman mengenai kehidupan berpolitik

Peneliti mengakui masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Penelitian ini membuka pandangan untuk penelitian selanjutnya untuk mendalami dari sisi kuantitatif, sehingga penelitian selanjutnya lebih bisa terukur secara statistik. Sisi lainnya yang menarik untuk diteliti adalah apa motivasi partai politik yang kalah dalam pemilu sebelumnya masih ikut dala Pemilu Tahun 2024, dimana dapat diketahui secara historis dan statistik bahwa kesempatan mereka untuk menang tidak besar.

Daftar Pustaka

- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). Hambatan dan tantangan partai politik: Persiapan menuju pemilihan umum 2024. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(2), 214-229.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/4235>
- Aminuddin, M. F., Ramadlan, M., & Shodiq, F. (2015). Match-All party: pragmatisme politik dan munculnya spesies baru partai politik di Indonesia pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*, 1(1), 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.9>
- Arriola, L. R., Choi, D. D., Davis, J. M., Phillips, M. L., & Rakner, L. (2022). Paying to party: Candidate resources and party switching in new democracies. *Party Politics*, 28(3), 507-520.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354068821989563>
- Artada, Y. (2023). *Gagal Paham Etika Politik, Kader Kutu Loncat Dinilai Hanya Mengejar Kekuasaan*. JPPN. https://m.jpnn.com/news/gagal-paham-etika-politik-kader-kutu-loncat-dinilai-hanya-mengejar-kekuasaan#google_vignette
- Bob-Milliar, G. M. (2012). Political party activism in Ghana: factors influencing the decision of the politically active to join a political party. *Democratization*, 19(4), 668-689. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510347.2011.605998>
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Budiasrawan, I. P. A. (2023). *Banyak Parpol Sulit Dapat Caleg gegara Faktor Materi*. detik.com. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6698888/banyak-parpol-sulit-dapat-caleg-gegara-faktor-materi>
- Farisa, F. C. (2022). *9 Partai Politik Boleh Pakai Nomor Urut Lama pada Pemilu 2024, Ini Rinciannya*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/13/16221641/9-partai-politik-boleh-pakai-nomor-urut-lama-pada-pemilu-2024-ini-rinciannya>
- Gustien, E. (2023). *Surat PAW Kasir Perlu Ditelusuri di DPRD Riau*. goriau.com.
<https://www.goriau.com/berita/baca/surat-paw-kasir-perlu-ditelusuri-di-dprd-riau.html>
- Hangartner, D., Ruiz, N. A., & Tukiainen, J. (2019). Open or closed? How list type affects electoral performance, candidate selection, and campaign effort. *VATT*

- Institute for Economic Research Working Papers*, 120.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3418767
- Hidayaturrahman, M., Ngarawula, B., & Sadhana, K. (2022). Political investors: Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(2), 269-281.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2057891120917213>
- Iman. (2023). *Cara Instan Parpol Mendulang Suara*. RRI.
https://www.rri.co.id/indepth/199/caleg-artis-jurus-instan-parpol-mendulang-suara?utm_source=indepth_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign
- Jati, W. R. (2014). Historisitas Politik Perempuan Indonesia. *Paramita: Historical Studies Journal*, 24(2).
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/3123>
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 14(1), 1-13.
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/2859>
- Negara, S. H. M., & Sardini, N. H. (2020). PERILAKU ‘LOMPAT PAGAR’ POLITISI MENJELANG PEMILU LEGISLATIF 2014 DI JAWA TENGAH. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 251-260.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/27335/23867>
- Prabowo, E., Hidayat, D. R., Sugiana, D., & Aly, B. (2020). Money Politics vs. Political Cost; Enforcing and Honest Democracy. *Journal of Social and Political Sciences*, 3(1). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3527438
- Pradana, M. Y. A. (2020). Elite Rationality, Traditions and Pragmatic Politicians. *Journal Of Politics And Policy*, 153-172.
<https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/29>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4284>
- Priyanda, Y. (2023). *Pengamat: Mahar Politik Penentuan Nomor Urut Caleg Adalah Celah Hukum*. Kupastuntas. Kupastuntas.com.
<https://www.kupastuntas.co/2023/05/28/pengamat-mahar-politik-penentuan-nomor-urut-caleg-adalah-celah-hukum>
- Putra, S. Y. (2023). *Terdaftar di DCS Hanura, Anggota DPRD Riau Kasir Pindah Nyaleg ke PKB*. beritasatu.com.
<https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/28929/terdaftar-di-dcs-hanura-anggota-dprd-riau-kasir-pindah-nyaleg-ke-pkb>
- Rayda, N. (2023). *Alasan mengapa fenomena politisi “kutu loncat” marak di Indonesia*. Channelnewsasia.com. <https://www.channelnewsasia.com/indonesia/indonesia->

pemilu-alasan-ada-fenomena-politisi-kutu-loncat-yang-pindah-pindah-partai-3972176

- Rayda, N. (2023). *Why political party-hopping is rampant in Indonesia and can anything be done about it*. channelnewsasia.com. <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-election-party-hopping-politicians-3877516>
- Saragih, A. (2023). *Pemilu Proporsional Terbuka dan Politisi Kutu Loncat*. . Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/31/13412751/pemilu-proporsional-terbuka-dan-politisi-kutu-loncat?page=all>
- Subekti, D., & Al-Hamdi, R. (2023). Political Motives of Islamic Parties in Nominating Celebrities as Legislative Candidates for the 2024 Elections. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 4(3), 160-170. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/download/18673/8511>
- Sultan, W. F., Tamma, S., & Yunus, A. (2022). Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(2), 151-166. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/viewFile/3080/1923>
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Vidiani, Y. R. (2023). *Nyaleg DPRD Riau Lagi, Kasir ST Pindah Dari Hanura Ke PKB, Ada Apa?* riauonline.co.id. <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/10/03/nyaleg-dprd-riau-lagi-kasir-st-pindah-dari-hanura-ke-pkb-ada-apa>
- Waku, F. (2022). *Nomor Urut Parpol Parlemen Boleh Tak Berubah, PPP: Kami Memilih Diundi*. Tribunnews. <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2022/12/13/nomor-urut-parpol-parlemen-boleh-tak-berubah-ppp-kami-memilih-diundi>
- Wiryono, S., & Setuningsih, N. (2023). *Kritik Parpol Prioritaskan Artis Jadi Bacaleg, Populi Center Sebut Harusnya Dilihat dari Kapasitas*. kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/25/06093751/kritik-parpol-prioritaskan-artis-jadi-bacaleg-populi-center-sebut-harusnya>